



Konsep dan Prinsip SPMI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah : Tinjauan Pustaka

Annisa Nurfadlila Putri Al Ghifari^{1*}, Adhilia Bunga Deshinta²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: annisa.21038@mhs.unesa.ac.id*

Abstract. *The quality of primary education in elementary schools and Islamic elementary schools is a crucial factor in forming the character and skills of the next generation. Education is a fundamental pillar in a country's development. This article examines the Internal Quality Assurance System's (SPMI) ideas and tenets as well as the difficulties in putting it into practice in SD/MI. With an emphasis on ongoing assessment as a way to raise the caliber of instruction, a literature review is the study methodology employed. According on the results, SPMI can assist in determining the advantages and disadvantages of teaching methods and provide suggestions for any necessary enhancements.*

Keywords: *Primary Education, Elementary Schools, Islamic Elementary Schools, Educational Evaluation.*

Abstrak. Mutu pendidikan dasar di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah merupakan faktor krusial dalam membentuk karakter dan keterampilan generasi penerus bangsa. Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan suatu negara. Artikel ini mengkaji gagasan dan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta kesulitan dalam penerapannya di SD/MI. Dengan penekanan pada penilaian berkelanjutan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran, tinjauan literatur adalah metodologi penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil tersebut, SPMI dapat membantu menentukan kelebihan dan kekurangan metode pengajaran dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Kata kunci: Pendidikan Dasar, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Evaluasi Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar utama kemajuan suatu negara adalah pendidikan. Pendidikan dasar di Indonesia yaitu jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sangat penting untuk membangun karakter dan kemampuan generasi muda. Dalam hal ini, pendidikan berkualitas tinggi sangat penting untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk memastikan seluruh aspek pendidikan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar.

Lembaga pendidikan menggunakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk menjamin bahwa proses pendidikan berjalan selaras dengan rencana dan mencapai tujuan. SPMI berfungsi untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap berbagai hal, seperti manajemen, metode pengajaran, kurikulum, dan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan SPMI, sekolah diharapkan dapat menemukan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan dan memutuskan bagaimana memperbaikinya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan, yaitu menciptakan lulusan berkualitas yang siap menghadapi tantangan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis konsep dan prinsip SPMI serta masalah yang dihadapi saat menerapkannya di SD/MI. Penulis juga akan memberikan saran untuk metode yang dapat digunakan oleh sekolah untuk mengatasi masalah ini serta meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dalam usaha untuk memaksimalkan kualitas pada pendidikan di Indonesia, terutama di tingkat sekolah dasar, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pendidik, pengelola sekolah, dan pihak terkait lainnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendekatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) digunakan oleh suatu satuan pendidikan untuk memastikan seluruh aspek pendidikan, termasuk metode pengajaran, kurikulum pembelajaran, dan hasil belajar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan dari SPMI adalah untuk menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan di institusi pendidikan.

Studi menunjukkan bahwa melalui evaluasi berkelanjutan, SPMI dapat meningkatkan kualitas pendidikan. SPMI dapat membantu meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan dan memfasilitasi perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan (Mulyasa, 2011). Selain itu, sistem ini mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua, siswa, dan guru.

Namun demikian, berbagai kesulitan seringkali muncul saat menerapkan SPMI. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman pendidik tentang pentingnya evaluasi diri. Hal ini dapat menyebabkan evaluasi yang tidak lengkap dan tindakan perbaikan yang tidak efektif (U. Raharjo et al., 2019). Selain itu, penelitian (Akbar Romadlon & Bagus Hendy Kurniawan, 2022) menemukan bahwa data yang dihasilkan dari proses evaluasi seringkali tidak digunakan dengan benar untuk pengambilan keputusan.

Penelitian menunjukkan bahwa pendidik harus diberi pelatihan yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip SPMI dan bagaimana menerapkannya di sekolah untuk meningkatkan efektivitasnya (Fitiriani et al., 2021). Untuk membuat lingkungan pendidikan yang responsif dan berkualitas tinggi, semua pemangku kepentingan harus bekerja sama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Referensi yang digunakan berkaitan erat dengan literatur ilmiah yang mendukung kajian teoritis. Dalam penelitian yang menggunakan studi literatur, proses yang diikuti meliputi tiga tahap yaitu, 1) pendahuluan, 2) pembahasan utama, dan 3) kesimpulan. Data yang diambil berasal dari rujukan yang sangat relevan, seperti buku terkait materi, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dan buku. Analisis data menggunakan teknik analisis isi, di mana literatur dibaca berulang kali dan dilakukan pengecekan silang antar sumber untuk memastikan keakuratan data serta mengurangi risiko kesalahan. Hasil penelitian dilaporkan dengan menyusun temuan berdasarkan prinsip kesederhanaan, mengingat adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan kajian pustaka yang lebih mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Demi memastikan tercapainya mutu pendidikan di institusi pendidikan, lembaga pendidikan, pelaksana program pendidikan, pemerintah lingkup daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat menggunakan sistem penjaminan mutu internal. Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 yang membahas mengenai Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa evaluasi dalam sistem pendidikan meliputi penilaian layanan pendidikan, kinerja satuan, program pendidikan di tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan nasional tentang pengawasan, penjaminan, penetapan, dan peningkatan kualitas pendidikan telah dipenuhi. SPMI digunakan untuk memastikan bahwa semua bagian lembaga pendidikan memenuhi standar pendidikan nasional dan menciptakan budaya mutu.

Regulasi dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Undang-Undang ini menciptakan dasar hukum untuk penyelenggaraan pendidikan yang baik, termasuk menjamin kualitas pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini menetapkan aturan untuk pengelolaan pendidikan, termasuk pengawasan dan penjaminan mutu.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Prinsip-Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu internal memuat sejumlah prinsip (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, n.d.), yaitu:

- 1) Mandiri dan partisipatif
SPMI dilaksanakan secara mandiri oleh suatu lembaga pendidikan, yang berarti setiap sekolah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu tanpa bergantung pada pihak eksternal.
- 2) Terstandar
SPMI harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), untuk dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan yang dilakukan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.
- 3) Integritas
Data yang digunakan dalam SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- 4) Sistematis dan berkelanjutan
SPMI dilaksanakan secara terstruktur dan terus-menerus mengikuti prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam siklus SPMI. Proses penjaminan mutu dilakukan secara berulang hingga menjadi bagian dari budaya, melalui langkah-langkah seperti pemetaan mutu oleh sekolah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penetapan kebijakan.

5) Holistik

Pelaksanaan SPMI dilakukan secara menyeluruh, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam siklus yang sama. Proses penjaminan mutu berjalan berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya pendidikan, dengan langkah-langkah yang mencakup pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penetapan.

6) Transparan dan akuntabel

Semua kegiatan yang terkait dengan implementasi SPMI harus terdokumentasi dengan rinci dengan berbagai bentuk dokumen mutu yang nantinya dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Komponen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Di lembaga SD/MI, sistem penjaminan mutu internal adalah kerangka yang sangat penting agar dapat memastikan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Salah satu elemen utama SPMI adalah standar mutu, yang mencakup kriteria dan ukuran yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dalam hal kurikulum, proses pembelajaran, dan hasil belajar. Hal ini membantu pihak terkait memahami tujuan dan ekspektasi pendidikan dan memudahkan evaluasi dan perbaikan (Rahminawati Pendidikan Agama Islam et al., 2021).

Komponen selanjutnya adalah pengelolaan, yang mencakup struktur organisasi dan pembentukan tim penjaminan mutu. Tim ini terdiri dari kepala sekolah, pendidik, dan staf administrasi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan dengan baik. Untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian standar mutu, monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara teratur. Data tentang kinerja pendidikan dikumpulkan melalui proses ini, seperti observasi kelas dan hasil ujian (Suryono, 2020).

Komponen penting lainnya adalah dokumentasi; setiap tindakan, hasil evaluasi, dan tindakan perbaikan harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan semua hal jelas dan adil. Setelah evaluasi selesai, langkah-langkah perbaikan harus dituangkan dalam dokumen tindakan perbaikan, yang mencakup solusi konkret untuk masalah yang ditemukan. Sosialisasi dan pelatihan juga penting karena dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan semua pihak yang terlibat dalam implementasi SPMI, termasuk manajemen, guru, dan staf (Roshadah, n.d.).

Selain itu, diharapkan bahwa sistem umpan balik dapat mengumpulkan pendapat dari orang tua, siswa, dan masyarakat tentang kualitas pendidikan yang diberikan. Sangat membantu untuk menemukan kekuatan dan kelemahan lembaga pendidikan dengan data

ini. Terakhir, audit internal adalah prosedur pemeriksaan berkala yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen SPMI bekerja sesuai dengan rencana dan standar.

Beberapa dokumen penting yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPMI adalah manual mutu, yang menjelaskan kebijakan dan prosedur SPMI, dan rencana kerja, yang merinci pelaksanaan SPMI. Selain itu, sangat penting juga laporan evaluasi yang mencatat hasil monitoring dan evaluasi, dokumen tindakan perbaikan yang menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang diambil, dan dokumen pelatihan yang mencatat instruksi yang diberikan kepada staf. Ini semua memungkinkan institusi pendidikan untuk memenuhi persyaratan dan terus meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. SPMI berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan.

Siklus atau Tahapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di SD/MI

Pelaksanaan penjaminan mutu internal ini melibatkan kerjasama terpadu antara seluruh pemangku kepentingan dan warga sekolah. Berdasarkan Buku Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2016, SPMI dilakukan melalui lima tahapan utama (Raharjo et al., 2019, 23), yaitu:

a) Pemetaan Mutu

Pemetaan peningkatan mutu dilakukan sekolah dengan cara menggunakan dokumen evaluasi diri yang didalamnya sudah termasuk sebuah instrumen yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Di tahap ini, sekolah bersama tim penjaminan mutu pendidikan melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) melalui aplikasi e-EDS yang telah disediakan oleh kemendikbud. Evaluasi Diri Sekolah dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa langkah penting. Pertama, dilakukan penyusunan instrumen sebagai alat untuk mengukur berbagai aspek mutu berdasarkan SNP. Selanjutnya, tahap pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen sekolah guna mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif. Setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan pengolahan serta analisis data untuk dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi sekolah. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun peta mutu, yaitu gambaran kondisi aktual mutu pendidikan di sekolah. Melalui peta mutu ini, sekolah dapat mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan merancang strategi perbaikan yang efektif, sehingga mutu pendidikan pada suatu

lembaga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu

Berdasarkan peta mutu, sekolah menyusun dokumen yang berisi perencanaan pengembangan dan rencana aksi. Dokumen ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah, seperti kurikulum, SNP, serta rencana strategis mengenai pengembangan sekolah.

c) Implementasi Rencana Peningkatan Mutu

Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah disusun selama periode tertentu, seperti satu semester atau satu tahun ajar.

d) Evaluasi atau Audit Internal

Evaluasi dilakukan untuk dapat memastikan implementasi peningkatan mutu sekolah berjalan sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi berupa laporan pelaksanaan yang berisi pemenuhan SNP, hasil implementasi rencana aksi, dan rekomendasi perbaikan jika terdapat penyimpangan.

e) Penetapan Standar Mutu Baru dan Penyusunan Strategi Peningkatan

Melalui hasil dari tahap evaluasi, sekolah dapat menetapkan standar mutu baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Strategi baru disusun untuk memenuhi SNP dan, jika sudah tercapai, menetapkan standar mutu yang melampaui SNP.

Indikator Keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal di SD/MI

Indikator dari sistem penjaminan mutu internal berpedoman pada Peraturan Kemendikbud No.28 Tahun 2016. Dari pedoman tersebut kemudian dikembangkan dalam indikator, yaitu indikator output, outcome, dan dampak (Raharjo et al., 2019, 24). Indikator Output dapat dikatakan tercapai bilamana terwujudnya suatu peningkatan mutu pendidikan pada suatu satuan pendidikan yaitu dengan terpenuhinya seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi 8 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pengelolaan.

Indikator Outcome dapat dikatakan terpenuhi bila adanya peningkatan pada kualitas proses pembelajaran serta manajemen sekolah secara berkelanjutan. Contohnya yaitu peningkatan hasil belajar pada peserta didik, peningkatan pada hasil penilaian kinerja pendidik, prestasi pada lembaga pendidikan, terciptanya lingkungan belajar yang nyaman,

serta yang lainnya. Indikator yang terakhir yaitu Indikator Dampak, yang dapat dilihat melalui terbentuknya budaya mutu pada lembaga pendidikan dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan.

Evaluasi Dalam Lingkup SPMI

Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menentukan serta menilai apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang nantinya akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan terhadap objek yang dievaluasi. Informasi dan bukti ketercapaian tujuan dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, baik secara formal maupun informal, untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat penting untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan secara objektif dan mendalam. Dalam konteks pendidikan, evaluasi berperan penting sebagai mekanisme pengendalian mutu pendidikan di tingkat nasional. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan peserta didik (Sumeyasa et al., 2020, 77).

Salah satu bentuk evaluasi dalam sistem penjaminan mutu internal adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS merupakan alat evaluasi yang dirancang untuk menggali informasi tentang ketercapaian mutu pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Proses ini memungkinkan sekolah untuk secara mandiri menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam proses memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui EDS, informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis yang berbasis data, seperti menyusun peta mutu, merancang program perbaikan, dan memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain, EDS menjadi bagian integral dari evaluasi dalam SPMI dan sebagai langkah awal untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

Contoh penerapan evaluasi diri sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah dapat dilihat pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batang Hari, kepala sekolah selaku ketua manajerial menerapkan berbagai langkah strategis dalam melaksanakan evaluasi diri sekolah. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada suatu lembaga, termasuk guru, siswa, dan orang tua, melalui metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Untuk mendukung pelaksanaan, kepala sekolah membentuk tim EDS yang terdiri dari guru serta tenaga kependidikan lainnya yang bertugas membantu analisis data.

Setelah data terkumpul, kepala sekolah dan tim EDS kemudian menganalisis data tersebut untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, serta tantangan yang dihadapi oleh madrasah. Hasil analisis ini dirangkum dalam dokumen EDS yang memuat temuan serta rekomendasi perbaikan. Dokumen tersebut kemudian disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan membangun dukungan yang diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi, kepala sekolah menyusun rencana tindak lanjut yang terarah untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi. Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan, kepala sekolah juga memastikan adanya proses monitoring dan evaluasi berkala untuk mengawasi pelaksanaan rencana tindak lanjut. Pendekatan ini memungkinkan madrasah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan sekaligus menjaga akuntabilitas terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan (Amrizal et al., 2024).

Permasalahan Dalam Pelaksanaan SPMI

Implementasi dari sistem penjaminan mutu di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas dan keberlanjutan upaya peningkatan mutu pendidikan. Salah satu tantangan utama ialah penjaminan mutu yang masih terbatas pada pemantauan di tingkat satuan pendidikan. Dalam banyak kasus, kegiatan pemantauan hanya berfokus pada pengumpulan data administrasi tanpa diiringi dengan langkah konkret untuk menganalisis dan merancang program tindak lanjut yang sesuai. Akibatnya, proses penjaminan mutu kehilangan esensinya sebagai alat evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Pemetaan mutu pendidikan juga belum terintegrasi secara efektif di antara penyelenggara pendidikan, baik di tingkat lokal, regional, atau nasional. Ketiadaan integrasi ini menyebabkan setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang jelas dalam menyusun strategi peningkatan mutu secara kolektif, sehingga menciptakan kesenjangan mutu antar wilayah.

Masalah lain yang cukup mendasar adalah kurangnya pemanfaatan data mutu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Data mutu yang dihasilkan dari berbagai proses evaluasi seringkali hanya berakhir sebagai dokumen arsip tanpa diolah dan digunakan secara optimal untuk menyusun rencana perbaikan atau kebijakan yang relevan. Padahal, data tersebut memiliki potensi besar untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan, kelemahan sistem, serta peluang untuk pengembangan. Dalam konteks ini, sekolah sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami bagaimana data dapat

diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Selain itu, penerapan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), yang merupakan bagian inti dari SPMI, juga masih mengalami kendala signifikan. Banyak satuan pendidikan memandang EDS sebagai tugas administratif semata, bukan sebagai proses refleksi yang mendalam untuk memahami kondisi riil sekolah. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan pelaksanaan EDS sering kali dilakukan secara formalitas, tanpa ada upaya serius untuk menggali informasi yang relevan atau mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap EDS sebagai kebutuhan esensial untuk perbaikan mutu belum sepenuhnya terinternalisasi, baik di tingkat sekolah maupun di kalangan pemangku kepentingan (Warta et al., 2024, 19).

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih terarah dalam mengatasi permasalahan ini, mulai dari penguatan koordinasi antar penyelenggara pendidikan, optimalisasi pemanfaatan data mutu, hingga peningkatan pemahaman dan kapasitas sekolah dalam melaksanakan EDS secara mendalam dan bermakna. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa SPMI benar-benar menjadi sistem yang efektif dalam mendorong pendidikan Indonesia menuju standar mutu yang lebih tinggi dan merata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu pendekatan sistematis dan terpadu yang dirancang untuk menjamin kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Melalui regulasi yang jelas dan prinsip-prinsip yang kokoh, SPMI berfungsi untuk memastikan seluruh aspek pendidikan telah memenuhi standar nasional yang sudah ditetapkan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya integrasi dan pemanfaatan data yang optimal, SPMI tetap berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menjadi alat strategis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan komitmen untuk menerapkan SPMI secara efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas sistem penjaminan mutu internal di sekolah dasar, perlu ada kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi terkait. Kebijakan internal yang mendukung SPMI harus jelas disosialisasikan agar semua pihak memahami perannya. Pelatihan berkala bagi staf pendidikan juga penting untuk

meningkatkan kapasitas mereka. Implementasi SPMI harus sistematis dengan rencana aksi yang terukur, serta dilakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk perbaikan berkelanjutan. Dokumentasi di setiap tahap SPMI berfungsi sebagai alat evaluasi dan referensi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SPMI dapat berjalan lebih efektif, menciptakan budaya pendidikan berkualitas, dan meningkatkan mutu pendidikan di jenjang sekolah dasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung kesuksesan penelitian ini, khususnya kepada dosen mata kuliah atas arahan dan bimbingannya, serta kepada pihak-pihak terkait yang telah menyediakan sumber referensi yang relevan sehingga penelitian dengan judul "Konsep dan Prinsip SPMI dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah: Tinjauan Pustaka" dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar Romadlon, D., & Bagus Hendy Kurniawan, A. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah dasar. *PSSH UMSIDA*. <https://pssh.umsida.ac.id>
- Amrizal, Z., Afiyah, S., & Hikmah, J. (2024). Strategi kepala madrasah dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Batang Hari. *Educational Leadership*, 3(2).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, K. P., & K. (n.d.). *Pedoman umum sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah*.
- Fitiriani, R., Rahayu, S., & Susanto, H. (2021). Peran kolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12–20.
- Mulyasa, H. E. (2011). *Manajemen pendidikan karakter* (1st ed.). PT Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GT6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=manajemen+pendidikan+mulyasa&ots=seyJL8_7kf&sig=bYyL8BW_kxIUykhrPp032W_zhYA&redir_esc=y#v=onepage&q=manajemen%20pendidikan%20mulyasa&f=false
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015*. www.peraturan.go.id
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (n.d.). *Salinan Permendikbudristek No 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.-a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.-b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan*.

- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Raharjo, S. B., Handayani, M., Jauhari, M. R., & M, F. J. (2019). *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. <https://litbang.kemdikbud.go.id>
- Raharjo, U., Sari, D., & Prabowo, H. (2019). Tantangan implementasi SPMI di sekolah. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 23–24.
- Rahminawati Pendidikan Agama Islam, N., Tarbiyah dan Keguruan, F., Islam Bandung Jl Tamansari No, U., Tamansari, K., & Bandung Wetan, K. (2021). Sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan kualitas sekolah dasar. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Roshadah, N. A. (n.d.). *Pengelolaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di MA Al-Ma'arif Singosari*.
- Sumeyasa, I. N., Sunu, I. G. K. A., & Ariawan, I. P. W. (2020). Evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu. *JAPI*, 11(2), 75. <https://doi.org/10.23887/japi.v11i2.3409>
- Suryono, A. (2020, July 18). Mengenal sekolah model sistem penjaminan mutu internal (SPMI). *SMK Negeri 2 Magelang*. <https://smkn2mgl.sch.id/read/163/mengenal--sekolah-model--sistem-penjaminan-mutu-internal--spm>
- Warta, W., Sulastriningsih, K., & Umronih, D. (2024). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. *Technomedia Journal*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.33050/tmj.v9i1.2230>